



**MEKANISME KERJASAMA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DAN INSTANSI TERKAIT
DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS

HERLANGGA WISNU MURDIANTO

1620622139

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2019**



**MEKANISME KERJASAMA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DAN ISTANSI TERKAIT
DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

HERLANGGA WISNU MURDIANTO

1620622139

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2019**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Herlangga Wisnu Murdianto

NRP : 1620622139

Tanggal : 3 Mei 2019

Jakarta, 3 Mei 2019

Yang Menyatakan,



Herlangga Wisnu Murdianto

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herlangga Wisnu Murdianto
NRP : 1620622139
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **MEKANISME KERJASAMA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DAN ISTANSI TERKAIT DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

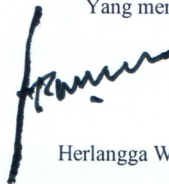
Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Mei 2019

Yang menyatakan



Herlangga Wisnu Murdianto

PENGESAHAN


Tesis yang diajukan oleh :

Nama : Herlangga Wisnu Murdianto
NRP : 1620622139
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : **MEKANISME KERJASAMA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DAN
ISTANSI TERKAIT DALAM PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.




Dr. Erni Agustina. S.H.,Sp/N
Ketua Penguji



Dr. Muhammad Hatta, SH, MKn
Penguji II/ Pembimbing



Dr. Handoyo Prasetyo, SH, MH
Ka. Prodi



Dwi Desi Yawi Tarina, S.H., M.H.
Dekan

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 3 Mei 2019

**MEKANISME KERJASAMA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DAN ISTANSI TERKAIT
DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

HERLANGGA WISNU MURDIANTO

ABSTRAK

Penelusuran aset hasil tindak pidana dapat dilakukan oleh PPATK baik di dalam maupun di luar negeri melalui kerjasama dan koordinasi. Penelusuran aset di dalam negeri dilakukan dengan bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan (PJK bank dan non bank) serta penyedia jasa/barang lainnya. Kemampuan untuk mendeteksi dugaan terjadinya money laundering, PPATK tidak hanya dapat melacak jejak harta kekayaan sebagai hasil kejahatan yang ditempatkan dalam sistem keuangan terkait proses pencucian uang, tapi juga menghentikan dan berupaya melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mengambil kembali sebagai asset negara yang ditelah diambil pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia? 2. Bagaimana Koordinasi antara PPATK dengan lembaga lainnya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi antara PPATK dengan lembaga lainnya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa 1. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal yaitu pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. 2. Koordinasi antara PPATK dengan lembaga lainnya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dimulai dari tindakan PPATK memberikan informasi keuangan yang bersifat rahasia (financial intelligence) kepada penegak hukum (penyidik Kepolisian, penyidik KPK, penyidik BNN dan yang berwenang lainnya). Dalam hal ini, PPATK menyerahkan penanganan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 44 Perpres No 50 Tahun 2011 tentang PPATK) dan meminta perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang.

MECHANISM OF THE COOPERATION OF THE FINANCIAL TRANSACTION REPORTING AND ANALYSIS CENTER (PPATK) AND RELATED ISSUES IN INQUIRY AND INVESTIGATION CRIMINAL MONEY LAUNDERING ACTION

HERLANGGA WISNU MYRDIANTO

ABSTRACT

Searching assets resulting from criminal acts can be carried out by PPATK both at home and abroad through cooperation and coordination. Searching for assets in the country is carried out by cooperating with financial service providers (bank and non-bank FSA) and other service providers / goods. The ability to detect allegations of money laundering, PPATK not only can track traces of assets as a result of crimes placed in the financial system related to the money laundering process, but also stop and attempt to collaborate with relevant agencies in order to take back as state assets taken by the perpetrators . The problems in this study are 1. How is the authority of investigation and investigation in money laundering crimes in Indonesia? 2. How is the coordination between PPATK and other institutions in handling money laundering in Indonesia? While the purpose of this study is 1. To find out and analyze the authority of investigations and investigations in money laundering in Indonesia. 2. To find out and analyze the coordination between PPATK and other institutions in handling money laundering in Indonesia. With the juridical normative research method, it is known that 1. The authority of investigation and investigation in money laundering crimes is carried out by the original criminal investigator, namely an official from an agency authorized to carry out an investigation, namely the Republic of Indonesia National Police, Prosecutor's Office, Corruption Eradication Commission (KPK), the National Narcotics Agency (BNN), as well as the Directorate General of Taxes and the Directorate General of Customs and Excise of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The criminal investigator can carry out an investigation into the crime of Money Laundering if he finds sufficient evidence of the occurrence of a crime of Money Laundering when investigating a criminal offense according to his authority. 2. Coordination between PPATK and other institutions in handling money laundering crimes begins with the PPATK action to provide financial intelligence to law enforcers (police investigators, KPK investigators, BNN investigators and other authorities). In this case, the PPATK hands over the handling of assets that are known or reasonably suspected to be the result of criminal acts to investigators to be resolved in accordance with statutory provisions (Article 44 of Presidential Regulation No. 50/2011 concerning PPATK) and request the development of investigations and investigations conducted by investigator of original crime and money laundering crime.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul :

“MEKANISME KERJASAMA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DAN ISTANSI TERKAIT DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”

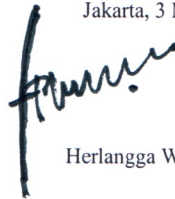
Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yai Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
3. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dan selaku Pembimbing I.
4. Dr. Muhammad Arafah Sinjair, SH, M.Hum, Pembimbing II.
5. Dosen Penguji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
6. Seluruh rekan-rekan penulis baik di teman-teman di Kejaksaan maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional-UPN "Veteran" Jakarta.
7. Seluruh rekan-rekan, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta (bapak, ibu, suami dan anak tercinta dan tersayang yang masih ada di dalam kandungan yang selalu mendukung dan menemani bundanya untuk menyelesaikan

segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan) dan yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 3 Mei 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Herlangga', written in a cursive style.

Herlangga Wisnu Murdianto

DAFTAR ISI

JUDUL TESIS	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
1.5.1. Kerangka Teori.....	7
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
II.1. Hukum Pidana.....	17
II.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
II.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
II.1.3. Jenis Tindak Pidana.....	21
II.1.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
II.1.5. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus	30
II.2. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	32
II.2.1. Pengertian Pencucian Uang.....	32
II.2.2. Sejarah Terjadinya Pencucian Uang	34
II.2.3. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	39
II.2.4. Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang.....	48
II.3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	55
II.3.1. Pengertian PPATK	55
II.3.2. Sejarah Pembentukan PPATK	56
II.3.3. Tugas dan Wewenang PPATK	60
II.3.4. Pelaporan Transaksi keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan.....	62
II.3.5. PPATK sebagai Finance Intelligence Unit (FIU)	69
BAB III METODE PENELITIAN	71
III.1. Tipe Penelitian	71
III.2. Sifat Penelitian	71
III.3. Sumber Data.....	71
III.4. Metode Pengumpulan Data.....	72
III.5. Metode Analisis data.....	73
BAB IV PERAN PPATK DAN ISTANSI TERKAIT DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ...	75

IV.1. Kewenangan penyelidikan dan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	75
IV.2. Koordinasi antara PPATK dengan lembaga lainnya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.....	86
BAB V PENUTUP	107
V.1. Kesimpulan	107
V.2. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	